

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) 2024

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

Email: programdistankp@gmail.com

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, senantiasa kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena atas perkenannya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tugas yang diemban Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kepada pimpinan daerah, selain itu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini juga merupakan gerbang informasi untuk mengetahui, mengenal dan memahami pembangunan pertanian dan ketahanan pangan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024.

Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam pengembangan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan daerah pada masa yang akan datang.

Benteng, 5 Februari 2025

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar,

Ir. AL AMIN, S.Pi.,M.M Pangkar. Pembina, IV/A NIP. 197710142015011001

DAFTAR ISI

		1	Halaman
KATA 1	PENG.	ANTAR	i
DAFTA	R ISI		ii
DAFTA	R TAI	BEL	iii
DAFTA	AR GA	MBAR	iv
BAB I	PENI	DAHULUAN	
	1.1.	Gambaran Umum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1
	1.2.	Struktur Organisasi, Tugas Pokok Dinas Pertanian	
	1.3.	dan Ketahanan Pangan Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi	2
		Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Data	
		Jabatan Struktural, Data Jabatan Fungsional,	
		Jumlah Tenaga Kontrak	5
	1.4.	Realisasi Keuangan	8
BAB II	CAP	AIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN	
	PEM	ERINTAHAN DAERAH	
	2.1.	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarka	n
		Indikator Kinerja Kunci Keluaran/Output	10
	2.2.	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarka	n
		Indikator Kinerja Kunci Hasil/Outcome	14
BAB I	II CA	PAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTU	JAN
	DA	N PENUGASAN	
	3.1.	Tugas Pembantuan dan Penugasan yang	
		Dilaksanakan	16
	3.2.	Permasalahan dan Kendala	23
	3.3.	Saran dan Tindak Lanjut	23
BAB I	V PE	NUTUP	25

DAFTAR TABEL

	Hala	man
Tabel 1.3.1	Keadaan Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan	
	Pangan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun	
	2024	5
Tabel 1.3.2	Keadaan Aparatus Dinas Pertanian dan Ketahanan	
	Pangan Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang	
	Tahun 2024	6
Tabel 1.3.3	Data Jabatan Struktural Dinas Pertanian dan	
	Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar	7
Tabel 1.3.4	Data Jabatan Fungsional Dinas Pertanian dan	
	Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar	7
Tabel 1.3.5	Data Tenaga Kontrak/PHL Dinas Pertanian dan	
	KetahananPangan Berdasarkan Struktur Jabatan	
	Tahun 2024	8
Tabel 1.4	Realisasi Capaian Keuangan TA. 2024	8
Tabel 2.1	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan	
	Indikator Kinerja Kunci Keluaran/Output	10
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan	
	Indikator Kinerja Kunci Hasil/Outcome	14
Tabel 3.1	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas	
	Pembantuan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	
	yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten	
	Kepulauan Selayar	20
Tabel 3.2	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas	
	Pembantuan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sula Selatan yang dilaksanakan	wesi
	oleh Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	22

DAFTAR GAMBAR

			Halaman
Gambar	1.	Foto Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar	1
Gambar	2.	Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar	2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47). Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, adalah tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan beralamat di Jl. DR. Sam Ratulangi No. 17 Benteng, Kode Pos 92812. E-mail programdistankp@gmail.com.

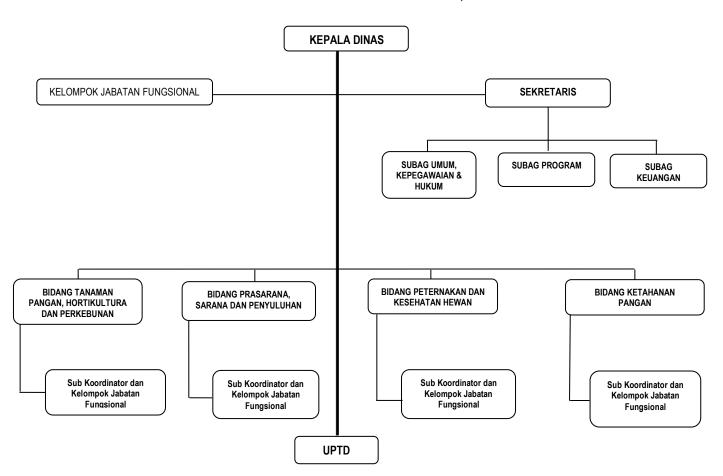


Gambar 1. Foto Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar

1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 dijabarkan melalui Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 688).

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar (Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 137 Tahun 2021)



Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian dan ketahanan pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil serta pemberian izin pelaksanaan pelayanan umum di bidang pertanian dan ketahanan pangan.

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- 1. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- 2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- 4. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok Kepala Dinas meliputi:

- 1. menyusun rencana kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- 5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6. merumuskan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- 7. menyelenggarakan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- 8. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- 9. menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- 10. melaksanakan administrasi Dinas;
- 11. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- 12. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- 13. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 14. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Dinas serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 15. menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Data Jabatan Struktural, Data Jabatan Fungsional, Jumlah Tenaga Kontrak

Dalam melaksanakan urusan pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, salah satu faktor penunjang terpenting adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Jumlah pegawai pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai kondisi terakhir 31 Desember 2024 adalah 125 pegawai.

a. Kualifikasi pendidikan

Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3.1. Keadaan Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2024

		Jenis 1		
No	Kualifikasi Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	SLTP	0	0	0 orang
2.	SLTA	14	10	24 orang
3.	DIPLOMA SATU (D1)	0	0	0 orang
4.	DIPLOMA TIGA (D3)	2	2	4 orang
5.	SARJANA (S1)	34	54	88 orang
6.	MAGISTER	5	4	9 orang
	Jumlah	55	70	125 orang

b. Pangkat dan Golongan Ruang

Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3.2. Keadaan Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang Tahun 2024

No.	Pangkat	Golongan	Jenis	Jumlah	
	1 ungine	dololigun	Laki-laki	Perempuan	Cumun
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	2	5	7
2.	Pembina Tk. I	IV/b	4	2	6
3.	Pembina	IV/a	5	7	12
4.	Penata Tk. I III/d 9 16		25		
5.	Penata	III/c	8	11	19
6.	Penata Muda Tk. I	III/b	8	11	19
7.	Penata Muda	III/a	3	8	11
8.	Pengatur Tk. I	II/d	6	2	8
9.	Pengatur	II/c	7	1	8
10.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	0	0	0
11.	Pengatur Muda	II/a	0	0	0
12.	PPPK	IX	0	1	1
13.	PPPK VII 0		0	1	1
14.	PPPK	V	4	4	8
	Jumlah		56	69	125

c. Data Jabatan Struktural

Data Jabatan Struktural Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3.3 Data Jabatan Struktural Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

No	Jabatan	Struktur	Jenis	Kelamin	Jumlah	V.	
NO	Struktural	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumian	Ket.	
1.	Kepala Dinas	Eselon II	1	0	1 orang	Terisi	
2.	Sekretaris	Eselon III A	0	1	1 orang	Terisi	
3.	Kepala Bidang	Eselon III B	2	2	4 orang	Terisi	
4.	Kepala Sub Bagian	Eselon IV A	-	3	3 orang	Terisi	
5.	Kepala UPTD	Eselon IV A	1	1	2 orang	Terisi	
6.	Kepala TU UPTD	Eselon IV B	-	2	2 orang	Terisi	
	Jumlah		4	9	13 orang		

d. Data Jabatan Fungsional

Data jabatan fungsional Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peta Jabatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3.4. Data Jabatan Fungsional Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Jabatan Fungsional	Jenis	Jumlah	
	oabatan Fungsional	Laki-laki	Perempuan	Juillan
1	Penyuluh Pertanian	35	31	66
2	Medik Veteriner Ahli Pertama	0	1	1
3	Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama	1	0	1
4	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	0	2	2
5	Penyuluh Pertanian (PPPK)	4	6	10
	Jumlah	40	40	80

e. Data Tenaga Kontrak

Data tenaga kontrak atau Pegawai Harian Lepas (PHL) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut : Tabel 1.3.5. Data Tenaga Kontrak/PHL Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Ioniana Dandidikan	Jenis	Jumlah	
МО.	Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Juman
1	Sarjana	42	35	77
2	Diploma	0	1	1
3	Sekolah Menengah Atas	10	38	48
4	Sopir	1	0	1
5	Petugas Kebersihan Kantor	1	0	1
	Jumlah	54	74	128

1.4. Realisasi Keuangan

Realisasi keuangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4. Realisasi Capaian Keuangan TA. 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
]	Pendapatan Daerah	50.000.000,-	13.027.500,-	26,06
1.	Pendapatan	50.000.000,-	13.027.500,-	26,06
Belar	ıja Daerah	17.029.085.529,-	15.919.296.193,-	93,48
1.	Belanja Operasi	14.936.973.029,-	14.191.892.245,-	95,01
2.	Belanja Modal	2.092.112.500,-	1.727.403.948,-	82,57

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah menyebutkan bahwa Ratio Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 1,481 dengan kategori Kapasitas Fiskal Daerah Tinggi.

BAB II. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran/ Output

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	PANGAN							
		303	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak infrastruktur pergudangan	7 unit LPM 1 unit Gudang Pangan	Ada	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Foto LPM dan Gudang Pangan
		304	Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	Penyaluran beras 0 Kg	Tidak Ada	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Belum adaanya Peraturan Daerah yang mendasari Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
		305	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan local	Ada/tidak regulasi harga minimum daerah	Rekap Data Harga Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar 2024	Ada	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Laporan Pemantauan Harga Eceran (Konsumen) Komoditi Pangan Strategis
		306	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/ tidak kegiatan pemberdayaan masyarakat	P2L = 1 KWT Bantuan benih sayuran = 3 KWT	Ada	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	 Laporan Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) 1 KWT BAST benih sayuran kepada 3 KWT
		307	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan	1 peta	Ada	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Laporan FVSA

No.	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		308	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	Bantuan pangan	Ada	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data Penerima bantuan pangan
		309	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/tidak penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Penyaluran beras 0 Kg	Tidak Ada	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Belum adaanya Peraturan Daerah yang mendasari Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
		310	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/tidak kegiatan pengawasan keamanan pangan segar	Laporan Hasil Uji Residu Pestisida	Ada	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Kegiatan pengawasan pangan segar

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2.	PERTANIAN							
		473	Sarana pertanian yang diberikan	Jumlah sarana pertanian yang diberikan	Daftar Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan KetahananPangan	- Bibit tanaman = 23.257 pohon - Benih padi = 4750 Kg - Pestisida (Roundup) = 124 botol - Kawat duri = 200 roll - Mesin pemotong rumput = 2 buah - Tungku pengasapan kopra = 1 buah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data
		474	Prasarana pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana pertanian yang digunakan	- Irigasi = 2 unit - Jalan pertanian = 12 unit	13 Unit	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Kartu Inventaris Barang (KIB)
		475	Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian	Jumlah izin pengeluaran ternak = 119 SKKH	119 SKKH	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data
		476	Persentase prasarana yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan x 100% Jumlah prasarana yang dibangun	Prasarana yang aktif digunakan = 12 unit Prasarana yang dibangun = 12 unit	100%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Kartu Inventaris Barang (KIB)
		477	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	Jumlah usulan yang difasilitasi x 100% Jumlah usulan usaha pertanian	Jumlah usulan yang difasilitasi = 119 skkh Jumlah usulan usaha pertanian = 119 skkh	100%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		478	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Jumlah area yang dapat ditanggulangi x 100% Luas area terkena bencana pertanian	Peternakan: Jumlah area yang dapat ditanggulangi = 325 Luas area terkena bencana penyakit menular ternak = 1,053 Ha Pertanian: Jumlah area yang dapat ditanggulangi = 287,86 Ha Luas area terkena bencana pertanian = 1.449,97 Ha	 Persentase fasilitasi penanggulangan bencana penyakit menular ternak = 30,86% Persentase fasilitasi penanggulangan bencana pertanian = 19,85% 	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data

2.2. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil/ Outcome

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Outcome Urusan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan		
1	Pangan									
		50	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan x 100% Jumlah kebutuhan pangan	- Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten : 32,34 ton - Jumlah kebutuhan pangan : 16.255 ton	0,19%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data		

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Outcome Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan		
1.	Pertanian									
		94	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun x 100% luas panen	Produksi pertanian: 18.967,38 Ton Luas panen: 3.808,70 Ha	Produktivitas : 4,98 ton/Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data produksi dan luas panen Padi, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		95	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – Jumlah kejadian/ kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	Jumlah kejadian penyakit/ kasus tahun berjalan : 931 Jumlah kejadian/ kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya : 1013	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular : -9,87%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data

3.2. Permasalahan dan Kendala

Sebagian besar Tugas Pembantuan diberikan dalam bentuk program/kegiatan (DIPA) yang sudah jadi/final, termasuk dalam hal Petunjuk Operasional Kegiatannya (POK), sehingga mengakibatkan seringnya ditemui kesulitan dalam pelaksanaannya di lapangan. Terbitnya aturan terkait penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, berdampak dilakukannya rasionalisasi anggaran pada Kementerian dan Lembaga. Implementasinya di daerah diantaranya melalui rasionalisasi dana Tugas Pembantuan baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.

Revisi DIPA dilakukan beberapa kali ditengah perjalanan untuk menyesuaikan dengan pagu baru, sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan dilapangan. Dana yang dialokasikan dari beberapa kementerian ada yang menurun atau bahkan tidak ada dari tahun sebelumnya sehingga banyak target/sasaran yang belum bisa tercapai.

3.3. Saran dan Tindak Lanjut

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya dan tindak lanjut adalah meningkatkan koordinasi dengan Eselon I (Kementerian /Lembaga) juga dengan untuk memperoleh informasi terkait perubahan alokasi DIPA. Selanjutnya perlu dilakukan perencanaan ulang kegiatan dan identifikasi capaian output kegiatan dalam rangka menyesuaikan dengan pagu baru.

Satuan Kerja harus melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan tetap mempedomani petunjuk teknis yang diterbitkan Kementerian/Lembaga pemberi penugasan.

Diharapkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar agar tetap berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga untuk terlaksananya program/kegiatan pembangunan pertanian.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar secara umum dapat menggambarkan keadaan organisasi, pelaksanaan urusan pembangunan, alokasi anggaran yang diterima serta realisasi pencapaian kinerja tahun 2024. Dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Program dan kegiatan yang dilaksanakan didukung APBD Kabupaten Kepulauan Selayar, Dana Tugas Pembantuan Provinsi dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan upaya pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar.
- 2. Pencapaian kinerja demikian senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentinganya dapat terus diakomodir dalam Perencanaan serta Program Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulaun Selayar dalam rangka mewujudkan visi dan misi, serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
- 3. Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah telah ditetapkan, tentunya capaian kinerja ini merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen seluruh aparat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta pihak terkait lainnya, namun demikian capaian kinerja tersebut tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sempurna dilakukan.

- 4. Terlepas dari berbagai kesulitan dan hambatan yang ada, dengan cara pengukuran kinerja ini, maka pada tahun 2024 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat melaksanakan sasaran strategis dengan total 4 (empat) program urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (pangan); 5 (lima) program urusan pemerintahan pilihan (pertanian); dan 1 (satu) program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
- 5. Beberapa kekurangan seperti kesesuaian antara penyelesaian Anggaran dengan Fisik kegiatan seharusnya tetap dijadikan acuan dalam menentukan kinerja di masa yang akan datang sehingga apa yang telah dicapai oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar bisa selalu dipedomani untuk panduan langkah selanjutnya.
- 6. Dengan kerjasama dan pemahaman serta komitmen yang dibangun masing-masing pihak terkait berbagai hambatan/kesulitan dapat diatasi dengan memperhatikan skala prioritas.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kami sampaikan sebagai laporan dan bahan evaluasi kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar selama tahun 2023. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini, saran dan masukan sangat diharapkan guna perbaikan lebih lanjut. Terima kasih.

Benteng, 5 Februari 2025 Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar,

Ir. AL AMIN, S.Pi.,M.M Pangkai Pembina, IV/A NIP. 197710142015011001